

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN BORONGAN DI RUMAH: Sebuah Alternatif Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan

Oleh : Windiani^{*)}

Abstrak

Tingginya tenaga kerja yang didominasi pekerja perempuan khususnya di sektor informal di perkotaan membutuhkan perhatian semua pihak yang *concern* terhadap isue-isue gender dan perempuan. Sampai saat ini belum ditemukan bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang relevan untuk pekerja sektor informal khususnya bagi pekerja perempuan borongan di rumah yang banyak terdapat di Kawasan Industri Rungkut Surabaya. Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, model pemberdayaan melalui program *Corporate Social Responsibility* menarik untuk dikembangkan dengan penguatan kelembagaan, pengembangan komunitas dan pelatihan berbasis pada ketrampilan dan kreatifitas pekerja perempuan dengan tetap memperhatikan kebutuhan perusahaan. Melalui strategi ini diharapkan menjadi alternatif dalam upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar khususnya pekerja perempuan dan keberlanjutan bagi perusahaan itu sendiri.

Kata Kunci: Perlindungan, Pemberdayaan, Pekerja Borongan , Kemiskinan

^{*)} Staf pengajar pada Unit Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora (UPM Soshum) – ITS.

Pendahuluan

Dalam mempertimbangkan bagaimana bersikap terhadap perempuan dalam proses pembangunan yang telah dan sedang berubah, tampak jelas bahwa berbagai pendekatan selama bertahun-tahun merefleksikan pandangan yang berbeda secara mendasar tentang paradigma pembangunan yang tepat maupun peran ekonomi dan sosial perempuan. Ketidakberhasilan mempertimbangkan perempuan sebagai individu dengan kebutuhan, hak dan kemampuan khusus, hanya akan mengakibatkan peningkatan beban kerja dan tingkat ketegangan perempuan dan bukannya perbaikan status dan pilihan mereka. Penting mengakui bahwa jika sebab utama subordinasi perempuan tidak diperhatikan, dan kebutuhan yang dijanjikan tidak diprioritaskan, proyek dan pembangunan yang melibatkan perempuan tidak akan menghasilkan perubahan berarti dalam hidup mereka.

Berdasarkan data yang dihimpun Biro Pusat Statistik mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 15,42% tahun 2009. Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi tersebut tidak luput dihadapi pula oleh kelompok perempuan yang jumlahnya lebih dari separo dari total penduduk di Indonesia. Hasil studi yang pernah dilakukan Pusat penelitian/studi Wanita Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga¹ ditemukan bahwa kurangnya penguasaan dan pemilikan asset produksi terutama tanah, modal, teknologi dan sebagainya terutama bagi perempuan. Itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa perempuan terus terlilit kemiskinan. Sementara tidak dapat dipungkiri bahwa sumbangan perempuan terhadap ekonomi keluarga sangat besar dan tidak diragukan lagi terutama bagi keluarga miskin.

Sejak Agustus 2008 hingga Agustus 2009 jumlah pekerja di Jawa Timur naik 442.800 orang. Seiring dengan kenaikan tersebut maka jumlah pengangguran di Jawa Timur turun 25,43 persen. Namun, berdasarkan klasifikasi pekerjaan, penyerapan tenaga kerja lebih terjadi karena inisiatif pribadi dan bukan karena keberhasilan program penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan ekspansi usaha swasta. Data BPS Jatim menunjukkan bahwa klasifikasi pekerjaan formal dan informal, maka sekitar 73,12 persen tenaga kerja di Jatim bekerja pada sektor kegiatan informal. Ini berarti bahwa sektor informal memang menawarkan peluang kerja yang lebih fleksibel, tapi masih lemah dalam jaminan keberlangsungan pekerjaan.

¹ Eva Kusuma Sundari Sutinah, *Kemiskinan Dan Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Surabaya*, Jurnal Suroboyo, Edisi 2 tahun 2002.

Pada periode Agustus 2009, jumlah pekerja sektor informal di Jatim sebesar 14,116 juta orang atau sekitar 73,12 persen dari total pekerja sebanyak 19,305 juta orang. Sementara itu, jumlah pekerja di sektor formal hanya 5,188 juta orang. Menurut Irlan (Kepala BPS Jatim), peningkatan jumlah pekerja di Jatim dalam setahun terakhir (Agustus 2008-Agustus 2009) banyak didominasi kaum perempuan. Penambahan pekerja perempuan sebesar 228.600 orang dan penambahan pekerja laki-laki hanya 194.200 orang. Mengingat jumlah perempuan cukup besar tanpa adanya dukungan kualitas dan melibatkannya dalam pembangunan maka perempuan yang secara kuantitas cukup besar tidak akan berpotensi produktif secara maksimal.

Hasil penelitian Ratna Saptari² tentang kerja perempuan di pedesaan dalam berbagai sistem produksi menunjukkan bahwa partisipasi yang aktif dalam kegiatan produksi, namun keterlibatan mereka selalu diwarnai oleh peran mereka atau asumsi tentang mereka dalam rumah tangga. Hal yang sama juga ditemukan dalam konteks kerja perempuan dalam ekonomi perkotaan. Selain tanggung jawab domestik yang selalu dilekatkan pada perempuan, posisi perempuan dipertanian, selalu dipengaruhi berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah.

Melihat fenomena yang demikian menarik untuk dipersoalkan apakah program-program pembangunan yang selama ini diterapkan sudah berperspektif gender? Mengapa perlu pemberdayaan perempuan di sektor informal seperti pada pekerja borongan di rumah? Dan model pemberdayaan seperti apa yang relevan untuk diterapkan untuk pekerja perempuan borongan di rumah tersebut?

Perspektif Sosiologis Tentang Angkatan Kerja di Perkotaan

Sejak awal terbentuknya perkotaan, telah ada diferensiasi yang besar di antara berbagai golongan dan kelas sosial. Diferensiasi ini terbentuk antara lain karena akses yang berbeda dalam sumber daya dan posisi seseorang dalam struktur produksi yang ada. Biasanya diferensiasi ini diperkuat oleh beberapa ciri sosial seperti, ras, kelompok etnis, atau jenis kelamin. Ekonomi perkotaan, secara umum digambarkan memiliki tiga sektor besar; *Pertama*, sektor industri modern berskala besar yang padat modal, *Kedua*, sektor birokrasi pemerintah tingkat nasional dan lokal, dan *ketiga*, sektor swasta pribumi berskala kecil yang jumlahnya cukup banyak³. Ketiga kategori pekerjaan yang ada dalam ekonomi

² Ratna Saptari, Holner Brigitte, *Perempuan Kerja Sosia Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Grafiti Indonesia, 1997)

³ J.E. Goldthorpe, *Sosiologi Dunia Ketiga: Kesenjangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1992) hal. 118

kota ini diisi oleh jenis tenaga kerja yang berbeda-beda.. Misalnya, sektor pertama dan kedua sering kali dikaitkan dengan tenaga kerja "terampil" sedangkan sektor ketiga biasanya dikaitkan dengan tenaga kerja "yang tidak begitu terampil". Terlepas dari sejauhmana klasifikasi semacam ini mencerminkan kenyataan yang sebenarnya dan berapa sektor yang sebenarnya memiliki ciri yang berbeda, tidak dapat disangkal bahwa pasar tenaga kerja terutama yang di kota seringkali terpilah-pilah ke dalam berbagai segmen. Salah satu segmen-segmen ini, selain kesukuan maupun kelas sosial, ialah *gender*.

Menurut Saptari⁴, ada dua perbedaan dasar antara tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan. Perbedaan pertama terkait dengan derajat keterlibatan di pasar tenaga kerja. Di seluruh dunia semua laki-laki berumur antara 25-55 tahun bisa dikategorikan sebagai bagian dari "angkatan kerja" atau mereka yang "secara aktif secara ekonomis". Di lain pihak, untuk separo atau seluruh hidupnya kaum perempuan sering dikategorikan sebagai 'pekerja rumah tangga yang tidak aktif secara ekonomis'.

Perbedaan kedua adalah bahwa pada saat memasuki pasar tenaga kerja, biasanya mereka terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang dianggap kurang terampil, kurang stabil (mudah mengalami penyusutan tenaga kerja), berupah relatif lebih rendah daripada kaum laki-laki, dan kemungkinan naik jenjang kecil⁵.

Bagaimana segmen-segmen dalam pasar tenaga kerja tersebut dapat muncul? Mengapa perempuan mengisi segmen-segmen yang berupah rendah dan umumnya tidak stabil? Dalam perspektif Sosiologi, salah satu usaha untuk menjelaskan mengapa terjadi segmentasi pasar tenaga kerja (*labour market segmentation*) seperti yang digambarkan Barron dan Norris dalam teori Pasar Tenaga Kerja Dualistis. Menurut mereka, pasar tenaga kerja pada dasarnya terbagi dalam dua segmen, yaitu segmen *Primer* dan sektor *sekunder*. Sektor *primer* memberi penghasilan yang relatif lebih besar, jaminan sosial dan kondisi kerja yang cukup baik, kestabilan kerja yang relatif besar, dan kemungkinan untuk naik pangkat. Sektor *sekunder*, memberi penghasilan yang relatif lebih rendah, jaminan sosial dan kondisi kerja yang rendah, dan ketidakmungkinan untuk naik dalam jenjang hierarki yang ada. Menurut Barron dan Norris, dualisme ini dapat terjadi karena pengusaha atau majikan membutuhkan suatu kelompok pekerja inti yang stabil dan mempunyai ketrampilan yang tinggi. Mereka pun membutuhkan suatu kelompok pekerja yang sewaktu-waktu bisa dihentikan pada saat produksi atau pekerjaan sedang menyusut, dan diangkat kembali pada saat produksi atau pekerjaan sedang meningkat.

⁴ Saptari, *Perempuan*, hal. 351

⁵ *Ibid*

Dengan mengidentifikasi kedua segmen tersebut menggunakan klasifikasi untuk menempatkan posisi buruh perempuan. Menurut mereka, buruh perempuan, kaum imigran dan kulit hitam secara potensial cenderung mengisi sektor sekunder karena memiliki lima atribut, yaitu: a) mereka mudah di "lepas"kan dari pekerjaannya, b) mereka bisa dibedakan dari pekerja sektor primer atas dasar ukuran-ukuran sosial yang konvensional, c) mereka tidak mempunyai kemauan untuk memperoleh latihan dan pengalaman yang berharga, d) mereka tidak menilai tinggi imbalan-imbalan ekonomi, e) mereka tidak akan mengembangkan hubungan solidaritas dengan rekan kerja mereka .

Pendekatan pemberdayaan atau Gender dan Pembangunan

Salah satu pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan (kerja produktif, reproduktif, privat dan publik) dan menolak upaya apa pun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga dikenal dengan 'pemberdayaan' atau lebih umum disebut "Gender dan Pembangunan (Gender and Develepment-GAD) terhadap perempuan dalam pembangunan. Pendekatan ini mempertanyakan teori-teori yang lazim diterima tentang apa yang dibawa oleh pembangunan yang baik, yang menegaskan bahwa ada nilai yang lebih dalam pembangunan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan ketimbang pemberdayaan perempuan itu sendiri untuk berusaha mengubah dan menstransformasikan struktur yang sangat bertentangan dengan mereka.

Kebutuhan Program Pembangunan Berperspektif Gender:

Pendekatan pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah terutama untuk perempuan lebih menekankan pada pendekatan ekonomi (lebih memusatkan pertumbuhan ekonomi). Terlihat sekali program program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah selama ini belum menampakkan sebagai suatu program pembangunan yang memberdayakan perempuan, atau dengan kata lain belum berperspektif gender.

Beberapa program pembangunan yang sudah dilaksanakan Pemerintah propinsi Jawa Timur seperti PAM DKP, PNPM Mandiri, P2SEM, Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Japes (Jaring Pengaman Sosial) dan sebagainya. Dalam prakteknya pelaksanaan program tersebut belum sensitif gender. Program padat karya sebagai contoh dengan sasaran korban

PHK, semestinya pemerintah mengetahui bahwa korban PHK perempuan pun cukup besar jumlahnya. Namun dalam pelaksanaannya lebih memusatkan pada laki-laki yang menjadi sasaran program tersebut. Ternyata yang dijadikan alasan adalah karena laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat kita termasuk pada para perencana pembangunan.

Jika program atau upaya untuk memberdayakan perempuan masih merupakan upaya yang bersifat *charity* (amal) yaitu suatu program yang berupa membagi ikan tanpa ditunjukkan bagaimana perempuan (miskin) bisa mencari ikan sendiri, maka program tersebut akan membuat perempuan semakin tergantung pada program amal yang diberikan tersebut (misal; BLT, raskin) konsekuensi yang paling parah adalah mematikan kreativitas perempuan dan pada akhirnya program pemberdayaan sulit untuk berhasil.

Sehingga untuk mengatasi ketidakberdayaan dan kemiskinan menurut Korten dan Syahrir diperlukan kebijakan yang sangat mendasar serta mengutamakan dimensi kerakyatan (*community based development*), sebab hanya orang miskin yang tahu kebutuhannya (*development from within*). Oleh karena itu perlu adanya pengembangan potensi yang dimiliki perempuan miskin tersebut, baik terkait pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi, potensi untuk mengelola dan pemenuhannya sendiri (*self management*), maupun potensi lokal yang dimiliki. Model pembangunan yang berbasis komunitas lebih mengutamakan karakteristik yang khas setiap daerah (*local specific*), karena potensi dan kebutuhan yang dihadapi setiap komunitas bisa berbeda-beda. Misalnya Komunitas pemulung perempuan, PKL perempuan, *homeworker* (buruh borongan rumah tangga) perempuan.

Mengingat jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih dari separo dari seluruh jumlah penduduk yang ada, maka tanpa adanya dukungan kualitas dan melibatkannya dalam pembangunan maka perempuan yang secara kuantitas cukup besar, tidak akan berpotensi produktif secara optimal sehingga tidak dapat menjadi modal pembangunan. Bahkan akan lebih parah lagi, jika sumberdaya perempuan ini tidak diberdayakan maka justru akan menjadi beban pembangunan. Apalagi jika Pembangunan Indonesia lebih memusatkan pada pembangunan manusia dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, maka keterlibatan perempuan mutlak diperlukan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja perempuan borongan di rumah: kasus kawasan Rungkut Industri Surabaya

Pekerja borongan (*Homeworking*) atau kerja borongan di rumah adalah kerja upahan yang dilakukan di rumah atas dasar satuan kerja yang dilakukan. Pekerjaan ini bisa merupakan pesanan seorang pedagang perantara yang

kemudian melemparkan hasil produksinya langsung ke toko-toko atau konsumen. Mereka bisa menjualnya ke perusahaan. Pedagang perantara—untuk sebagian—mendorong ke rumah-rumah, dan untuk sebagian lagi – mempekerjakan orang di rumahnya sendiri. Mungkin pula terjadi sebuah perusahaan mempunyai hubungan langsung dengan pekerja borongan di rumah, di mana sebagian produksi barang tertentu dikerjakan dalam dinding-dinding pabrik, sedangkan tahap-tahap lainnya dikerjakan di rumah-rumah. Atau sebuah perusahaan langsung melemparkan bahan-bahan mentah ke rumah-rumah di mana keseluruhan proses produksi dilakukan oleh pekerja borongan di rumah.

Dalam definisi seperti itu, jelas bahwa *homeworker* tidak bisa disamakan dengan pengusaha kecil yang memproduksi barang tertentu sendiri dengan bantuan tenaga keluarga karena untuk kategori yang terakhir ini baik suplai bahan baku maupun pemasaran hasil jadi dimiliki dan ditentukan oleh pengusaha atau pedagang. Sedangkan pengusaha kecil, untuk sebagian masih mempunyai kekuasaan atas bahan baku atau pasar.

Contoh kasusnya adalah komunitas pekerja borongan di Kawasan PT SIER: (Surabaya Industry Estate Rungkut) seperti di kelurahan Kutisari, Kendangsari, Tenggilis, Rungkut Tengah dan Rungkut Menanggal. Banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang terlihat tidak bekerja (sebagai Ibu Rumah Tangga), namun dalam kenyataannya mereka menerima kerja borongan seperti; melipat kardus, sablon *packaging*, mengupas bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Borongan tersebut diterima dari sebuah industri yang ada di kawasan SIER dengan sistem borongan. Misalnya menerima borongan melipat kardus; penerimaan pekerja perempuan borongan ditentukan berdasarkan harga satuan per kardus dan penghasilan mereka sangat tergantung dari berapa total kemampuan melipat dalam sehari. Jenis pekerjaan ini pun juga menjadi pilihan sebagian perempuan muda yang sulit untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja di sektor formal. Sehingga usia dan tenaga produktif turut menentukan tingkat penghasilan sebagaimana dari ibu rumah tangga yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada jenis pekerjaan ini.

Melihat realitas yang demikian, pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan dan pelatihan berbasis pada ketrampilan yang dimiliki penting untuk dikembangkan. Mengingat, posisi pekerjaan borongan yang masih lemah perlu dinaungi dalam bentuk wadah komunitas sehingga mampu meningkatkan posisi tawar mereka terhadap rekanan atau perusahaan yang mempekerjakannya. Model Pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan yang berada di area dekat perusahaan dengan sasaran komunitas perempuan yang bekerja borongan di rumah tersebut perlu dikembangkan untuk keberlanjutan sebuah perusahaan itu sendiri dengan memberikan pelatihan, ketampilan dan pendidikan bagi kelompok pekerja perempuan tersebut.

Sehingga mereka menjadi lebih produktif dan inovatif sekaligus keberlanjutan ekonomi dan perusahaan dapat terjaga dengan baik.

Mengapa Perlu Pemberdayaan?

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat⁶. Pemberdayaan perempuan berarti adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya untuk perempuan perlu dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PBB⁷ antara lain karena:

1. *Helping people to discuss their problem*: Memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam susana kebersamaan.
2. *Helping people to identify their most pressing problems*: Masyarakat dan perempuan khususnya kelompok marginal perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan, inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
3. *Fostering self-confidence*: Tujuan utama pemberdayaan adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama perempuan untuk berswadaya.
4. *Deciding on a program action*: Masyarakat khusus perempuan perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
5. *Recognition of strengths and resources*: Memberdayakan perempuan berarti membuat perempuan tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat

⁶ Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996)

⁷ www.kompas.com

dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

6. *Helping people to continue to work on solving their problems*: Pemberdayaan perempuan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, perempuan perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya.
7. *Increasing peoples ability for self-help*: Salah satu tujuan pemberdayaan perempuan adalah tumbuhnya kemandirian perempuan. Perempuan yang mandiri adalah perempuan yang sudah mampu menolong dirinya sendiri. Untuk itu perlu selalu ditingkatkan kemampuan perempuan untuk berswadaya.

Penutup

Diakui atau tidak, perempuan telah memberi kontribusi yang besar dalam perkembangan ekonomi keluarga dan negara. Sehingga program-program pembangunan yang dilakukan harus mampu mengakomodir kebutuhan perempuan baik kebutuhan praktis maupun strategis perempuan.

Terkait dengan pekerja perempuan borongan di rumah (*homeworking*) yang ada di kawasan Rungkut Industri, perlindungan dan pemberdayaan perlu diarahkan dengan pengembangan kelembagaan untuk perempuan pekerja borongan di rumah dalam skala komunitas. Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), sangat dimungkinkan terjalin sinergi perusahaan dengan masyarakat sekitar dengan tujuan untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar, lingkungan dan perusahaan itu sendiri. Adanya komitmen perusahaan dalam menyisihkan profitnya untuk masyarakat dapat diimplementasikan sebagian untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dapat diarahkan untuk mengembangkan komunitas bagi pekerja perempuan borongan di rumah melalui penguatan kelembagaan, dan pelatihan ketrampilan berbasis kreatifitas pekerja perempuan. Keberadaan perusahaan-perusahaan yang berada di Kawasan Rungkut Industri seperti Surabaya Industry Estate Rungkut (SIER) memungkinkan implementasi CSR dengan para pekerja perempuan dengan sistem borongan di rumah.

Model pengembangan dan pemberdayaan seperti ini jika diterapkan banyak perusahaan akan menjadi upaya dan strategi alternatif dalam mengentas kemiskinan bagi masyarakat di perkotaan. Bentuk pengembangan dan pemberdayaan ini dapat mengadopsi hasil penelitian Julia Cleves Mosse⁸

⁸ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

di mana CSR-nya diterapkan pada perusahaan kertas terhadap komunitas pemulung kertas di Ahmedabad India, yang mayoritas perempuan dan anak-anak, dan mampu memberdayakan secara ekonomi, sosial dan politik. Bantuan dalam bentuk pengembangan kelembagaan dapat meningkatkan posisi tawar dan memandirikan komunitas pekerja perempuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan ke'takberdayaan". Program yang dikembangkan perusahaan juga harus mengakomodir kebutuhan kelompok sasaran sehingga rencana yang dikembangkan bersifat *bottom up* dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Goldthorpe, J.E. *Sosiologi Dunia Ketiga: Kesenjangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Utama, Alih Bahasa Sukadijo, 1992)
- Kartasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996)
- KOMPAS, 1 Desember 2010
- Mosse, Julia Cleves, 1998, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saptari, Ratna, Holner Brigitte, 1997, *Perempuan Kerja Sosia Dan Perubahan Sosial*, J Jakarta, Grafiti Indonesia.
- Sutinah, Eva Kusuma Sundari, 2002, *Kemiskinan Dan Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Surabaya*, Jurnal Suroboyo, Edisi 2 tahun 2002.
- Tamam Achda, *Konteks Sosiologis CSR dan Implementasinya di Indonesia*, makalah, 2006.